

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Sebelum menjawab pertanyaan penelitian yaitu untuk menggambarkan peran CSO tersebut, penelitian ini sebelumnya menjelaskannya bagaimana posisi atau kedudukan organisasi masyarakat sipil di dalam proses politik khususnya di Indonesia. Dengan menggunakan konsep *state, market and civil society*, penelitian ini menggambarkan posisi CSO di dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa hubungan baik dan saling bergantungnya ketiga aktor yaitu, pemerintah, mekanisme pasar dan masyarakat sipil dapat menggambarkan suatu tatanan sosial yang baik. Bahkan menurut Hasel, alasan untuk mendefinisikan kembali hubungan masyarakat sipil, pemerintah dan ekonomi pasar sebagai syarat yang diperlukan untuk kesuksesan masa depan suatu negara. Penjelasan mengenai pentingnya interaksi ketiga aktor tersebut dapat dipaparkan secara singkat dimana peran mekanisme pasar dan negara sangatlah kuat. Hal ini dapat dilihat di dalam konteks proses pembangunan ekonomi di Indonesia dan bagaimana latar belakang pendekatan kebijakan pemerintah telah memberikan peran penting terhadap penerimaan modal asing.

Tumbuhnya peran masyarakat sipil di Indonesia dipengaruhi oleh adanya transisi dan proses politik di Indonesia yaitu, transisi demokrasi berakhirnya kekuasaan rezim otoritarian Orde Baru di tahun 1998 dan krisis ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa terdapat transisi perubahan dimana sebelumnya proses politik dikuasai penuh oleh negara dan mekanisme pasar menjadi sistem politik yang lebih terbuka dan demokratis terhadap posisi masyarakat sipil. Dengan mengetahui posisi CSO pada suatu proses politik, barulah peneliti dapat menganalisa peran CSO sendiri dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran IGJ

dalam memperjuangkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan melalui reformasi Perjanjian Investasi Bilateral di Indonesia?

Penelitian ini menyimpulkan bahwa IGJ sebagai *CSO High-Level Politics Grassroots Mobilization* menunjukkan adanya peran advokasi dan upaya intervensi yang kuat atas proses keputusan suatu kebijakan pemerintah Indonesia. Selain itu, peran IGJ telah dapat digambarkan sesuai sebagai mitra, katalis dan pelaksana di dalam konsep peranan CSO. Peranan tersebut dapat dilihat melalui kelima upaya yang telah dilakukan IGJ, seperti peran advokasi yang dapat dilihat pada upaya (1) mengkampanyekan isu melalui tulisan atau publikasi, diskusi publik dan kerjasama media, (2) mengkampanyekan isu melalui media sosial melalui tagar #noisds, (3) peran di dalam penandatanganan surat terbuka dengan koalisi CSO nasional maupun Internasional . Selain itu peran intervensi yang dapat dilihat dari upaya IGJ melakukan gugatan konstitusi pada hukum perjanjian internasional Indonesia dan keterlibatan IGJ di dalam forum Internasional dan audiensi langsung dengan pemerintah Indonesia. untuk memberikan masukan dan pendapat.

Penelitian ini menggunakan data yang diolah dengan proses penyesuaian kepada teori yang digunakan (*linking data to preposition*), dengan menggunakan konsep peran dan teori gerakan sosial baru. Selain itu, analisa pada peran yang diberikan IGJ tersebut tidak terlepas dari prinsip keadilan global dan karakteristik Global Justice Movement (GJM). Konsep peran di dalam analisa upaya atau perilaku yang diharapkan dengan posisi atau kedudukan IGJ yaitu sebagai CSO di Indonesia adalah untuk menyuarakan adanya implementasi kebijakan yang lebih berkeadilan. Dimana peran CSO ditekankan pada suatu kekuatan sebagai pengimbang kegagalan mekanisme pasar maupun negara di dalam proses pembangunan.

Selain itu, sesuai dengan pendekatan mobilisasi sumber daya di dalam teori gerakan sosial baru, peran IGJ digambarkan pada proses pembentukan organisasi untuk mencapai suatu tujuan kolektif. Partisipasi dalam gerakan sosial dipandang sebagai hasil proses keputusan rasional dimana orang melakukan pertimbangan yang matang. Secara umum upaya yang bentuk IGJ dalam kerja samanya dengan Internasional CSO lainnya sesuai dengan karakteristik suatu gerakan sosial yang didasari tujuan yang sama dengan memperluas jejaring sosial, dan suatu kerangka identitas. Selain itu, strategi gerakan sosial baru juga menekankan pada aktifitas politik kontroversial atau ketika suatu perwakilan gerakan dapat bekerja sama atau bergabung dalam konfrontasi dengan elit, otoritas, atau lawan. Oleh karena itu, penelitian menggunakan gerakan sosial baru untuk menganalisa gerakan yang dibentuk *Indonesia for Global Justice* dalam menganalisa proses mengumpulkan, mengoordinasikan, dan menopang suatu gerakan.

Peran yang telah diberikan IGJ sebagai bentuk dari suatu gerakan juga telah sesuai dengan elemen kekuatan dan keberlangsungan gerakan sosial yaitu (1) *cultural artifacts* atau *framing*, (2) *ogranisasi* atau *networking*, dan (3) *political opportunities*. Pada peran IGJ dalam melakukan riset dan publikasi mengenai kritik atas kelemahan klausul perjanjian didukung dengan upaya IGJ untuk meningkatkan kesadaran publik telah menggambarkan pentingnya suatu identitas gerakan atas tantangan kolektif yang dibentuk. Dimana, *cultural artifacts* atau *framing* menekankan bahwa pentingnya pembentukan suatu identitas suatu gerakan dengan mengumpulkan kepercayaan atau ideologi masyarakat luas dapat membangun suatu gerakan dengan menggaungkan tantangan kolektif.

Selain itu, dalam upaya IGJ membangun identitas gerakan, IGJ melakukan upaya tersebut tidak terlepas dari kegiatan diskusi publik yang tidak hanya

menyerukan suatu tujuan gerakan namun membuka aspirasi atau pendapat dari masyarakat umum. Diskusi publik merupakan salah satu bentuk dari kekuatan suatu gerakan sosial dengan cara memobilisasi sumber daya atas pemahaman maupun pandangan yang terlibat dan menjadi suatu gagasan maupun solusi suatu permasalahan.

Hal ini juga didukung dengan kerja sama media yang memainkan peranan penting dalam aksi gerakan sosial, seperti penyebaran informasi yang dapat di broadcast ke seluruh masyarakat. Strategi ini disebut sebagai *media framing*. Organisasi gerakan mencoba menjangkau dan mengumpulkan pengikut sebanyak mungkin. Oleh karena itu, anggota dalam suatu gerakan bukanlah satu-satunya yang dimobilisasi, dukungan media dan pembentukan opini publik yang mendukung gerakan juga merupakan sumber daya. Hal ini juga dapat digambarkan pada peran selanjutnya yang dilakukan IGJ, yaitu dengan melakukan kampanye melalui media sosial dalam menjaring gerakan-gerakan organisasi masyarakat lainnya, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Dengan memformulasikan berbagai potensi sumber daya untuk dimobilisasi, perluasan jaringan gerakan sosial pada sekutu elit mereka dapat menjadi strategi yang digunakan organisasi masyarakat sipil untuk mengontrol atau menggabungkan tindakan kolektif, beserta hasil yang ingin dicapai. Hal ini juga sesuai dengan elemen *organisation and networking* yang telah digambarkan pada upaya IGJ dengan terlibat pada aksi penandatanganan surat terbuka pada tingkatan global maupun nasional. Dalam kegiatan tersebut, IGJ telah berperan untuk terus mendorong dan mengingatkan kembali baik di dalam implementasi kebijakan pemerintahan Indonesia maupun negara lainnya yang ikut mendatangi surat terbuka tersebut.

Selain itu, peran IGJ lainnya seperti menggugat UU Perjanjian Internasional sebagai aksi kontroversial politik telah menggambarkan elemen *political opportunities*. IGJ telah menggunakan hasil gugatan konstitusi tersebut sebagai peluang politik untuk mendorong adanya proses kebijakan yang berkeadilan, yaitu melalui hasil keputusan untuk menyaring keputusan adanya perjanjian investasi sebagai salah satu perjanjian Internasional yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat atau berdampak pada anggaran keuangan negara harus melalui pertimbangan publik melalui ratifikasi pada UU dengan persetujuan DPR. Sehingga, adanya improvisasi atas kekuatan hukum dalam meratifikasi suatu perjanjian investasi bagi CSO untuk dapat mengintervensi dengan gagasan melalui persetujuan DPR.

Selanjutnya di dalam elemen peluang politik, IGJ juga melakukan audiensi secara langsung kepada perwakilan pemerintah Indonesia. Upaya tersebut menggambarkan adanya gerakan sosial yang dapat memberikan pengaruh langsung yaitu dengan membawa orang biasa ke dalam konfrontasi dengan lawan, elit, atau otoritas. Dimana perwakilan masyarakat sipil atau IGJ sendiri dapat memiliki kekuasaan karena mereka menantang pemegang kekuasaan, menghasilkan solidaritas, dan memiliki arti bagi kelompok populasi. Hal tersebut juga didukung dengan adanya koalisi masyarakat sipil atau kerja sama organisasi regional maupun internasional sebagai bentuk kekuatan identitas suatu gerakan sosial.

Selanjutnya, analisa pada peran IGJ pun telah sesuai dan dapat digambarkan dengan prinsip keadilan global dan dalam bentuk karakteristik gerakan keadilan global. Melalui elemen *individualism*, keadilan global sendiri memandang bahwa setiap manusia berhak atas pertimbangan moral yang sama. Pada elemen universalism, dimana IGJ memiliki tujuan untuk memberikan ruang pembentukan konsep keadilan dengan mempertimbangkan opini publik. Selanjutnya, prinsip

generalitas dimana IGJ mendukung adanya kekuatan global yang terbentuk dari dukungan masyarakat dan tidak hanya dari institusi global.

Selanjutnya, peran IGJ juga telah menggambarkan karakteristik GJM, yaitu dalam masalah yang dihadapi, politik yang ditantang dan bagaimana gerakan sosial beroperasi. Masalah ketidakadilan global dilihat dampak BIT untuk memberikan sedikitnya ruang bagi pemerintah dalam mengatur kebijakan ekonomi menggambarkan tantangan GJM bukan sebagai anti-globalisasi melainkan alternatif globalisasi. Peran yang diberikan IGJ menekankan pada solusi dalam mengadakan implementasi BIT yang lebih berkeadilan, yaitu memfokuskan perhatian terhadap kelemahan yang ada di dalam ketentuan BIT dan langkah selanjutnya untuk dapat mereformasi ketentuan tersebut.

Selain itu, melalui konsep *globalization from below*, IGJ melalui peran-peran gerakan sosialnya telah mendorong adanya ruang publik untuk terlibat dalam keputusan kerja sama global. Selain itu IGJ mengoperasikan gerakan sosial dengan membentuk kerja sama atau jaringan global, dan terlibat dalam diskusi internasional telah mencerminkan cara GJM beroperasi. Terbukanya ruang organisasi untuk memberikan pengaruh atau peran pada proses perubahan kebijakan telah menekankan adanya keadilan di dalam proses demokrasi. Dimana, prinsip keadilan global juga memandang keputusan suatu negara harus mewakili kepentingan publik atau hak-hak setiap individu. Dikaitkan pada proses pembangunan ekonomi dan sosial, prinsip ini juga menekankan pada kebebasan setiap individu untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Namun, penelitian ini menemukan adanya tiga kelemahan pada kegiatan yang dilakukan IGJ seperti lemahnya sumber daya IGJ di dalam membangun jaringan maupun popularitas publik. Selain itu, sumber daya untuk dapat lebih aktif terlibat

pada agenda forum global seperti WSF atau menggunakan manfaat dari teknologi saat ini untuk lebih aktif dalam mengadakan diskusi permasalahan dan meningkatkan pemahaman implementasi BIT dengan Internasional CSO lainnya. Kelemahan IGJ lainnya yaitu untuk dapat membuat publikasi mengenai dampak implementasi BIT global sehingga publik dapat pemahaman lebih luas mengenai pandangan global terkait isu. Mengingat upaya-upaya yang telah dilakukan IGJ sebelumnya, yaitu IGJ pernah mengadakan konsolidasi dan interaksi dengan beberapa internasional CSO secara langsung maupun melalui media sosial.

Selain itu, dikaitkan kembali kepada peran yang telah diberikan IGJ yaitu mengintervensi suatu proses keputusan kebijakan, IGJ telah memberikan ruang di dalam pengenalan suatu nilai keadilan global di dalam implementasi kebijakan pemerintah Indonesia. Dimana, prinsip keadilan global pun tidak hanya sampai pada perdebatan pada arti keadilan yang mutlak, namun suatu nilai ketidakadilan dapat terbentuk atas dasar penalaran publik yang tidak mengharuskan persetujuan dari semua orang. Penalaran publik ini menggambarkan upaya-upaya IGJ yang telah memberikan nilai partisipan lokal, sikap dan perspektif yang dapat dibentuk melalui GJM terhadap permasalahan ketidakadilan di dalam implementasi BIT. Mengingat negara sendiri bukan hanya menjadi instrumen suatu pengenalan nilai keadilan kepada masyarakatnya, tetapi juga sebaliknya yaitu memberikan ruang atau nilai keadilan yang dapat dievaluasi dari kepentingan bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

### WAWANCARA:

Sidik, R. Maulana., November 2020. Google Form Interview. Diakses melalui [https://docs.google.com/document/d/1lz1JbPpEhRL7hpweWf\\_-8Q4lfpscIPFY9CU4yyWonkI/edit](https://docs.google.com/document/d/1lz1JbPpEhRL7hpweWf_-8Q4lfpscIPFY9CU4yyWonkI/edit)

### BUKU:

- Baumgarten, B. (2017). Global justice movement: resistance to the dominant economic model of globalization. In Stefan Berger, Holger Nehring (Ed.), *History of social movements in a global perspective*. London: Palgrave Macmillan, hlm. 647
- Bull, H, 1983, *Justice in International Relations: 1983-84 Hagey Lectures*, University of Waterloo, Ontario, hlm. 91
- Caney, S. 2005. *Justice Beyond Borders*. Oxford University Press; New York, hlm. 28-29
- Coburn, E. 2003. *Interrogating Globalization: Emerging Contradicting and Conflict*. Garamond Press, hlm. 123
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Quantitative and Qualitative Method*. SAGE Publications: London
- Hansmann, Henry B. 1994. "The Role of Non-profit Enterprise". In Sharon M. Oster (ed). *Management of Non-Profit Organisations*. Brookfield, USA: Dartmouth.
- Hadiwinata, B. S. 2004. *Securitizing Poverty: The Role of NGOs in the Protection of Human Security in Indonesia*. Presentation, Singapore.
- Hadiwinata, B. S. 2017 *Studi dan Teori Hubungan Internasional*. Yayasan Pustaka Obor; jakarta.
- Morvaridi, B. 2008. *Social Justice and Development*. New York; Palgrave Macmillan, hlm. 180
- Nussbaum, Martha (2002). 'Capabilities and Human Rights', in Pablo de Greiff and Ciaran Cronin (eds), *Global Justice and Transnational Politics: Essays on the Moral and Political Challenges of Globalization*, hlm 117
- Pianta, M., & Marchetti, R. "*The Global Justice Movements: The Transnational Dimension*". In D. della Porta (Ed.), *The Global Justice Movement: A Cross-National and Transnational Perspective*, 2007. hlm. 30
- Pogge, Thomas W. (1988). 'Moral Progress', in Steven Luper-Foy (ed.), *Problems of International Justice* (Boulder: Westview), hlm. 284–304
- Porta, Donatella. (2005). *The Social Bases of Global Justice Movement*. Civil Society and Social Movement Programme; United Nations Research Institute for Social Development.
- Rusmanto, J. *Gerakan Sosial: Sejarah Perkembangan Teori antara Kekuatan dan Kelemahan*. (Palangkaraya; Zitama Publication, 2013).
- Sen, A. 2000. *Development as Freedom*. Alfred A. Knope: New York.
- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A Post- Modernist Critique diterjemahkan menjadi Gerakan Sosial Baru (GSB)*. Yogyakarta: Resist Book (terj, Indonesia diterbitkan tahun 2010).
- Singh, K. and Ilge, B. *Rethinking of Bilateral Investment Treaties*. (Amsterdam; SOMO, MADHYAM, BOTH ENDS, 2016), hlm. 43
- Smythe, E. (2011) 'Our World is not for Sale! The WSF Process and Transnational Resistance to International Trade Agreements' in J. Smith, S. Byrd, E. Reese, E.



- Smythe (eds.) Handbook on World Social Forum Activism (Boulder, CO:Paradigm Publishers)
- Tarrow, Sidney G. 2011. Power in Movement; Social Movements and Contentious Politics. Cambridge University Press; New York, hlm. ??
- Umar Suryadi Bakri, *Metode Penelitian Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Penerbit, 2017), hlm.12-15
- Van Hooft, Stan, Gillian Brock, “*Global justice : a cosmopolitanaccount, Ethics & global politics*”, vol. 2, no. 4, 2009, hlm. 369-382.
- Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

#### **JURNAL:**

- Alfadh, M. F. Oktober 2013. Keadilan Global dan Norma Internasional. Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 2 No. 2, hlm. 174.
- Amri E. Putra, Eka. V., dan Fernandes, R. 2016. Pola Hubungan Negara dan Civil Society. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan.
- Arjjumend, H. Regulatory Chill, Corporate Takeover and Environmental Government. International Journal of Current Advanced Research; Central University) Volume (6) issue 2 (December 2017)
- Collste, G. “*Globalisation and Global Justice: Introductory Essay*”. Globalisation and Global Justice - A Thematic Introduction. Journal of Philosophical: Linkoping University, 2016. DOI: 10.3384/de-ethica.2001-8819.16315
- Delanty, G. 2014. The prospects of Cosmopolitanism and the Possibility of Global Justice. Journal of Sociology SAGE; University of Sussex UK. Vol. 50 (2), hlm. 226
- Dietzel, A. (2018). Introducing Global Justice in International Relations Theory. E-International Relations Journal. Dietzel, A. (2018). Introducing Global Justice in International Relations Theory. E-International Relations Journal. Diakses dari <https://www.e-ir.info/2018/01/02/global-justice-in-international-relations-theory/>
- Fernando, J. L., Heston, A. W. 1997. Introduction: NGOs between States, Markets, and Civil Society. American Academy of Political and Social Science; Sage. Vol 554; The Role of NGOs: Charity and Empowerment.
- Fukuoka, Y. 2012. Political, Business and the State in Post-Soeharto Indonesia. JSTOR; Contemporary Southeast Asia Vol. 34 (1)
- He, B., Murhpy H. (2007). Global social justice at the WTO? The role of NGOs in constructing global social contractsInternational. International Affairs, Volume 83 (4), Hlm. 707–727
- Hermoso, Luca. Civil society’s role in promoting local development in countries in transition: A comparative study of the Philippines and Romania. SAGEPUB jurnal. International Social Work 49(3), hlm. 300
- Hidayati, E.H. 2017. Akibat Penghentian Bilateral Investment Treaty (Bit) Indonesia –Belanda Yang Dilakukan Secara Sepihak Oleh Indonesia . Usu Law Journal, Vol.5.No.2 (April 2017)
- Ismanto, S. 2017. Perubahan Politik dan Rent Seeking Activities di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal) 9(17):53. DOI: 10.19166/verity.v9i17.577
- Jack, S. and Baxter, P. 2008. Qualitative Case Study Methodology: Implementation for Novice Researcher. Canada: The Qualitative Report Volume 13 (4).

- Jocelyn Clare R. Hermoso and Carmen Geanina Luca. Civil society's role in promoting local development in countries in transition A comparative study of the Philippines and Romania *International Social Work* 49(3): 319–332. DOI: 10.1177/0020872806063404
- Juhairi, A. *Gerakan Anti-Globalisasi dan Pengaruh Terhadap Perkembangan Demokrasi di Indonesia*. *Journal Sosial Politik*, 2017, Vol 3, (2), hlm. 101-120
- Kukathas, C. 2013. On Sen on Comparative Justice. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 16(2).
- Langman, L. (2005) 'From Virtual Public Spheres to Global Justice: A Critical Theory of Internetworked Social Movements', *Sociological Theory*(23), hlm. 42–74.
- Lopez, Amanda R. (2014). The Impact of Social Media on Social Movements: The New Opportunity and Mobilizing Structure. Diakses dari [https://www.creighton.edu/fileadmin/user/CCAS/departments/PoliticalScience/Journal\\_of\\_Political\\_Research\\_JPR\\_/2014\\_JSP\\_papers/Lopes\\_JPR.pdf](https://www.creighton.edu/fileadmin/user/CCAS/departments/PoliticalScience/Journal_of_Political_Research_JPR_/2014_JSP_papers/Lopes_JPR.pdf)
- Nasution, N.Z. Klausula Counter-claim dalam Bilateral Investment Treaty Indonesia. *Jurnal Jurisdiction: Universitas Airlangga*. Volume 2 No. 6, November 2019
- Owa, O. 2017. The Role Of Non-Governmental Organizations (Ngos) In Strengthening Civil Society And Democratic Development. *International Digital Organization for Scientific Research. IDOSR JOURNAL OF ARTS AND MANAGEMENT* 2(2), hlm. 91-98
- Passy, F., Giugni, M. Social Movements and Policy Change: Direct, Mediated or Joint Effect?. *Departement of Political Science Journal: University of Geneva* (1998)
- Pleyers, G. 2010. The Global Justice. *Globality Studies Journal (GJS): Departement of Sociology and Anthropology Belgian Foundation for Scientific Research (FNRS)*, hlm. 5.
- Price, D. Indonesia's Bold Strategy on Bilateral Investment Treaties: Seeking an Equitable Climate for Investment?. *Asian Journal of International Law*, 7 (2017), pp. 124–151
- Rihwanto, Y. *Bilateral Treaties dan Penyelesaian Arbitrase (Studi Kasus Pencabutan Izin Kuasa Pertambangan Churchill Mining)*. *Journal Les Renaissance*, Vol 1(1). JANUARI 2016: 107 – 125
- Sangiovanno, Andrea. 2007. Justice and the Priority of Politics and Morality. *Journal of Political Philosophy: King's College London*.
- Sara Jamieson, A Model Future: The Future of Foreign Direct Investment and Bilateral Investment Treaties, 53 *S. Tex. L. Rev.* 605 (2012), hlm. 3
- Sudiono, L. 2020. State and Civil Society: G.W.F. Hegel Conception on the State's Constitution. *Jurnal UGM; Fakultas hukum*. Vol 31, No.1, hlm. 122
- Sujian Guo dkk., 2019 "Conceptualizing and Measuring Global Justice: Theories, Concepts, Principles and Indicators,

#### **PUBLIKASI INDONESIA FOR GLOBAL JUSTICE:**

- IGJ Arsip Konferensi Pers. 27 Mei 2015. Kaji Ulang Perjanjian Investasi. Diakses dari [www.igj.or.id](http://www.igj.or.id)
- IGJ Arsip. 2016. Civil Society Open letter to Governments in the 16 RCEP Countries. Diakses dari <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2016/12/RCEP-CSO-sign-on-letter.pdf>

- IGJ Arsip. 2019. Surat Terbuka untuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2019 – 2024. Diakses dari <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Surat-Terbuka-Koalisi-Koalisi-Masyarakat-untuk-Keadilan-Ekonomi-untuk-Presiden.pdf>
- IGJ Arsip. Open Letter From Seattle to Brussel Network. Diakses dari <https://s2bnetwork.org/sign-the-pen-letter-to-governments-on-isds-and-covid-19/>
- IGJ Arsip. 2018. Konsolidasi Gerakan Keadilan Global. Diakses dari <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/10/Konsolidasi-Gerakan-Keadilan-Global.pdf>
- IGJ Arsip. Diakses dari <https://igj.or.id/tandatangan-bit-indonesia-singapura-masyarakat-sipil-pertanyaan-komitmen-review-bit-pemerintah/>
- IGJ Arsip. Diakses dari <https://igj.or.id/isu-kontroversial-tidak-diatur-tapi-masih-terbuka-untuk-ditinjau-ulang/>
- IGJ Arsip. Diakses dari <https://igj.or.id/ambisi-indonesia-di-rcep-terlibat-dalam-global-value-chain-dan-penarikan-investasi/>
- IGJ Fact Sheets. (n.d). Review Bilateral Investment Treaty di Indonesia. Lembar fakta IGJ. Diakses pada 22 Maret 2020 melalui <https://igj.or.id/wp-content/uploads/2017/05/FACT-SHEET-Indonesia-BITS-Bahasa.pdf>

#### **LAPORAN RESMI:**

- Annual Press Statement of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 8 January 20105. Available at <http://www.kemlu.go.id>
- European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA), “A Response to the Criticism Against ISDS” (May 2015), online: EFILA <[http://efila.org/wp-content/uploads/2015/05/EFILA\\_in\\_response\\_to\\_the\\_criticism\\_of\\_ISDS\\_fi2nal\\_draft.pdf](http://efila.org/wp-content/uploads/2015/05/EFILA_in_response_to_the_criticism_of_ISDS_fi2nal_draft.pdf)>.
- Jailani, Abdulkadir. “*Indonesia’s Perspective on Review of International Investment Agreement*” in Rethinking Bilateral Investment Treaties Critical Issue and Policy Choices, Laporan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- Kementerian Komunikasi dan Informasi. Paket Kebijakan ekonomi Jilid II. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/6101/paket-kebijakan-ekonomi-jilid-ii/0/berita>
- Kementerian Luar Negeri RI BPPK. 2015. Kinerja Diplomasi Ekonomi: Evaluasi atas Perjanjian perdagangan dan Investasi. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Diakses melalui [www.kemenlu.org](http://www.kemenlu.org)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hasil Putusan MK. Diakses dari [https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/12/13\\_PUU-XVI\\_2018.pdf](https://igj.or.id/wp-content/uploads/2018/12/13_PUU-XVI_2018.pdf)
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ringkasan Perkara Nomor 13/PUU-XVI/2018. Diakses dari [https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume\\_perkara\\_1847\\_Perkara%20No.%2013%20-%20upload.pdf](https://www.mkri.id/public/content/persidangan/resume/resume_perkara_1847_Perkara%20No.%2013%20-%20upload.pdf)
- OECD Investor-State Dispute Settlement: An Essential Element of Investment Protection” (January 2015), online: OECD <<http://biac.org/wp-content/uploads/2015/02/BIAC-Investor-State-Dispute-Settlement.pdf>>
- UNCITRAL-General Essembly Doc. November 2018. Possible Reform of ISDS Comments by Government of Indonesia. UNCITRAL Working Group III: New York. DIAKSES DARI: KASI LIAT
- UNCTAD Report Issue 3. 2019. Taking Stock Of Iia Reform: Recent Developments; IIAs Issues Notes.

- UNCTAD Data BIT by Country. Diakses dari <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>
- UNCTAD Report Issue 1. Juli 2020. IIA Issue Note. Diakses melalui [www.unctad.org](http://www.unctad.org)
- UNCTAD Report Issue 2, “Investor-State Dispute Settlement: Review of Developments in 2019”, Issues Note No. 2, June 2019 at 1 [Investor-State Dispute Settlement]
- UNCTAD World Investment Report. 2015. Diakses dari [https://unctad.org/system/files/official-document/wir2015\\_en.pdf](https://unctad.org/system/files/official-document/wir2015_en.pdf)

#### **WORKING PAPER:**

- Allen & Overy. Counting the costs of investment treaty arbitration. *The International Journal of Commercial and Treaty Arbitration*. Diterbitkan pada 24 Maret 2014, diakses pada 10 Desember 2015. Diakses dari [http://www.allenoverly.com/SiteCollectionDocuments/Counting\\_the\\_costs\\_of\\_investment\\_treaty.pdf](http://www.allenoverly.com/SiteCollectionDocuments/Counting_the_costs_of_investment_treaty.pdf)
- Aswicahyono, H. & Christian, D. 2017. *Perjalanan Reformasi Ekonomi Indonesia 1997-2016*. CSIS Working Paper Series.
- Johansson, Anders C. 2014. *Political Change and the Business Elite in Indonesia*. Stockholm School of Economics; Asia Working Paper No. 34. Diakses pada <https://swopec.hhs.se/hascer/papers/hascer2014-034.pdf>
- Juwana, H. FH UI Artikel. Diakses dari <https://law.ui.ac.id/v3/hadapi-gugatan-newmont-2/>
- Magiera, Stephen. L. 2017. *International Investment Agreements and Investor-State Dispute: A review and evaluation in Indonesia*. ERIA Discussion Paper, hlm. 18.
- Sinclair, A., 2009. *ICSID Arbitration: how long does it take?*, 4:5 GAR J. Diakses dari <http://www.goldreserveinc.com/documents/ICSID%20arbitration%20%20How%20long%20does%20it%20take.pdf>
- UNCTAD. “Indonesia Bilateral Investment Treaties Data”. Diakses pada 20 November 2020 melalui <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/countries/97/indonesia>
- UNESCO Division of Social Transformations and Intercultural Dialogue. 2014. *Global Justice as a Framework for Eliminating Poverty*. Diakses melalui [http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/global\\_justice\\_background.pdf](http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SHS/pdf/global_justice_background.pdf)

#### **WEBSITE:**

- IGJ Website Info. Tentang Kami IGJ. Diakses dari <https://igj.or.id/tentang-kami/>
- Public Citizen. 2014. *ISDS Reform Options*. Diakses pada 20 Mei 2020 melalui [www.citizen.org](http://www.citizen.org)
- Public Citizen. 2014. *Case Studies: Investor-State Attacks on Public Interest Policies*. Diakses pada 20 Mei 2020 melalui [www.citizen.org](http://www.citizen.org)
- Stanford Encyclopedia. Maret 2015. *Global Justice*. Diakses pada [www.plato.stanford.edu/entries/justice-global/](http://www.plato.stanford.edu/entries/justice-global/)

#### **MATERI SEMINAR:**

- Mustopadidjaja AR. “Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi”. Makalah Seminar Manajemen Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia-ISMEI. Universitas Jenderal Soedirman, 10 Juni 1997, hlm. 2

**YOUTUBE:**

University of California. (2011). Justice: Local and Global with Amartya Sen. University of California Public Affairs Lecture. Diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=EhQqupgfL7s&t=740s> pada 12 October 2020.

**BERITA:**

Arianty, F. 2015. Sering Digugat, Pemerintah Jokowi Revisi Perjanjian Investasi. Berita Liputan6. Diakses pada <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2229991/sering-digugat-pemerintah-jokowi-revisi-perjanjian-investasi> (BERITA)

Hukum Online News. 2015. Perjanjian Internasional di Bidang Investasi Akan Ditinjau Ulang. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54bf82b18794b/perjanjian-internasional-di-bidang-investasi-akan-ditinjau-ulang/> (BERITA)

Sulistiyono, A.G. (2016), 'Indonesian Farmers File Class-Action Suit against Montara Over 2009 Oil Spill', The Jakarta Post, 3 August 2016. Available at: <http://www.thejakartapost.com/news/2016/08/03/indonesian-farmers-file-class-action-suit-against-montara-over-2009-oil-spill.html>

The Financial Times. Indonesia terminates 60s BITs. ????

Tucker, T. (2015), 'The TPP has a provision many will love to Hate: ISDS. What is it, and why does it matter?', *Washington Post*, 6 October 2015. Available at: [https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/10/06/the-tpp-has-a-provision-many-will-love-to-hate-isds-what-is-it-and-why-does-it-matter/?utm\\_term=.2bc8ec44602b](https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/10/06/the-tpp-has-a-provision-many-will-love-to-hate-isds-what-is-it-and-why-does-it-matter/?utm_term=.2bc8ec44602b)